



Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Mataram

¹Inka Nusamuda Pratama, ²Ilham Zitri, ³Ayatullah Hadi,
⁴Yudhi Lestanata, ⁵Hidayatullah, ⁶Rifaid, ⁷Rizal Umami

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Muhammadiyah Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 22-12-2021

Disetujui: 24-12-2021

Dipublikasikan :

30-12-2021

Kata Kunci :

Inovasi; Kebijakan;

Covid-19

Abstrak

Kondisi darurat akibat Covid-19 di Kota Mataram, menjadi tanggung jawab dan peran penuh Pemerintah Kota Mataram dalam menghasilkan terobosan sebagai langkah strategis dalam penanganan Covid-19 yang sedang terjadi. Hal ini penting bagi Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam mendesain kebijakan tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh dengan harapan dapat diketahui bagaimana inovasi yang dilakukan sebagai upaya penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Hasil penelitian ini, inovasi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 dikenal dengan kebijakan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Skema Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan tersebut dapat membangkitkan partisipasi masyarakat di lingkungan yang berada di Kota Mataram dalam mencegah merebaknya Covid-19 di tengah masyarakat. PCBL menggunakan tiga pendekatan yakni partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan sumber pendanaan dari masyarakat (swadaya). Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang ideal untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Seluruh komponen yang ada masyarakat, TNI, dan Polri agar mampu berkolaborasi secara kolektif dengan baik.

Mataram City Government Policy Innovations in Handling Covid-19 in Mataram City

Abstract

The emergency condition due to Covid-19 in Mataram City is the full responsibility and role of the Mataram City Government in producing breakthroughs as a strategic step in dealing with the ongoing Covid-19 situation. This is important for the local government of the city of Mataram in designing policies without overriding the policies that have been issued by the central government. The method used in this study is a qualitative descriptive method, because the aim is to describe the policy innovations of the Mataram City Government in handling Covid-19 in the city of Mataram. In this case, to analyze the data obtained in depth and thoroughly in the hope of knowing how the innovations were carried out as an effort to deal with Covid-19 in the City of Mataram. The results of this study show that the Mataram City government's policy innovation in handling Covid-19 is known as the Environmental-Based Covid-19 Handling (PCBL) policy. The Environment-Based Covid-19 Handling Scheme can generate community participation in the environment in the City of Mataram in preventing the spread of Covid-19 in the community. PCBL uses three approaches, namely community participation, community empowerment and funding sources from the community (self-help). This policy is considered an ideal policy to prevent the spread of Covid-19 in Mataram City. All components of the community, TNI, and Polri to be able to collaborate well collectively

2021 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik_Ummat

*Alamat Korespondensi:

¹ lnka.nusamuda@ummat.ac.id ² llham.zitri@ummat.ac.id

PENDAHULUAN

Covid-19 merupakan suatu bencana non alam, sebab diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari munculnya Covid-19 ini. Tidak hanya di Indonesia saja melainkan diseluruh dunia merasakan dampaknya. Kota Mataram merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdampak Covid-19. Kota Mataram ditetapkan sebagai Zona Merah penyebaran Covid-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dipertengahan April 2020. Tak pelak, Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Covid-19 Kota Mataram yang terdiri dari sejumlah unsur wilayah langsung bersiaga. Pasalnya memang tak bisa dianggap enteng, penyebaran Covid-19 di Kota Mataram tertinggi dari 10 Kabupaten atau Kota dan sudah menyebar di enam Kecamatan yang ada (*Website PU Kota Mataram*).

Saat itu Wali Kota Mataram Ahyar Abduh memang bertindak sangat cepat untuk Kota terpadat di Nusa Tenggara Barat ini. Melalui Surat Keputusan Nomor 574/IV/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non-Alam COVID-19 Kota Mataram Tahun 2020. Maklum saja, peluang penyebaran Covid-19 amat tinggi di wilayah dengan tingkat kepadatan 7.643 orang per kilometer persegi itu, atau di areal seluas 61,30 km² dengan total jumlah penduduk mencapai 477.476 jiwa tersebut (*Website PU Kota Mataram*).

Data terkini pertanggal 12 Januari 2021 Kota Mataram menjadi daerah tertinggi kasus penyebaran virus corona (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari data Pemprov NTB, kasus Covid-19 di Mataram mencapai 716 pasien dengan jumlah korban meninggal 48 orang. Diperingkat dua, Kabupaten Lombok Barat dengan 362 kasus positif Covid 19 dan 23 orang meninggal. Kota Mataram masuk zona merah penyebaran virus corona. Pemprov NTB bersama Forkopimda menjadikan Mataram skala prioritas penanganan Covid-19 (*Website Corona NTB Prov*).

Dari pernyataan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat “Terus bertambahnya kasus sebaran Covid-19 di Kota Mataram ini menjadi atensi kami (Pemprov NTB) agar bisa secepatnya ditangani, saatnya menerapkan '*punishment*' jika mau jualan atau masuk pasar harus menggunakan masker, apabila tidak diikuti jangan masuk pasar, itu konsekuensinya. Disamping itu Rohmi juga mengedukasi para pengunjung pasar agar dapat menggunakan masker dengan baik. Masker harus menutupi mulut dan hidung. Karena virus ini masuk ke tubuh melalui hidung dan mulut “Jangan pakai masker didagu atau dibawah hidung” (*Regional inews.id*).

Wakil Gubernur juga berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mendisiplinkan para pedagang dan pengunjung pasar tradisional untuk menggunakan masker. ketegasan yang dilakukan Pemerintah bukan untuk membatasi aktivitas masyarakat, tetapi untuk melindungi seluruh masyarakat di NTB dari penyebaran wabah Covid-19, sehingga dapat hidup aman dan terus produktif. Selama ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Kabupaten/Kota serta aparat TNI/Polri tidak henti-hentinya memberikan edukasi dan imbauan, mulai dari imbauan yang humanis hingga tegas. Pemerintah telah membagikan ribuan masker, mengajak dan mengimbau disetiap lokasi keramaian, hingga pelosok Desa untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi. Namun seiring waktu, kasus penyebaran Covid-19 tetap saja terus merangkak naik di NTB Terutama wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Terungkap adanya fakta bahwa, buruknya manajemen penanganan Covid-19 di Kota Mataram, ini terbukti dari adanya sidak yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, dari pengadaan masker yang minim, sampai pada pencampuran klorin dalam cairan disinfektan tanpa pengukuran akurat. Tak heran jika Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Mataram menilai bahwa upaya pencegahan penularan covid-19 di Kota Mataram terkesan main-main. Hal ini berbanding terbalik dengan besarnya anggaran yang disiapkan Pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Seperti diketahui, Pemkot Mataram mengalokasikan sekitar Rp. 135 miliar untuk penanganan Covid-19 di Kota Mataram (*Suara NTB*). Ini membuktikan bahwa buruknya upaya penanganan dan mitigasi bencana non alam Covid-19 di Kota Mataram.

Pandemi *Covid-19* termasuk bencana darurat, karena faktor non alam. Darurat Bencana merujuk pada peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Penyebabnya dapat berupa faktor alam, non alam, atau faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, atau dampak psikologis. Ketika bencana non-alam terjadi, implementasi penanganan bencana dilapangan memerlukan kesiapan dari para pihak yang terlibat di lokasi bencana non alam. Dampak bencana non alam memang tidak dapat diprediksi yang akan dialami disuatu daerah. Bencana non alam adalah sesuatu yang bersifat kompleks, dan ketika bencana non alam terjadi bisa saja suasananya menjadi *chaos* dan tidak terkendali sama sekali. Akan tetapi dengan perencanaan yang telah dilakukan oleh berbagai elemen akan mampu mengurangi dampak buruk yang akan terjadi. Bisa saja pelatihan organisasi lokal dalam mitigasi bencana dapat meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam mengurangi dampak yang lebih besar. Namun demikian apabila ternyata bencana non alam yang datang lebih besar dan diluar

prediksi, bisa jadi masyarakat lokal malah akan tergantung dengan pihak luar (Yumantoko, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh dengan harapan dapat diketahui bagaimana inovasi yang dilakukan sebagai upaya penanganan Covid-19 di Kota Mataram.

PEMBAHASAN

Kota Mataram ditetapkan sebagai Zona Merah penyebaran *coronavirus*, Covid-19, di Provinsi Nusa Tenggara Barat di pertengahan April 2020. Tak pelak, Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Covid-19 Kota Mataram yang terdiri dari sejumlah unsur wilayah langsung bersiaga. Pasalnya memang tak bisa dianggap enteng, penyebaran Covid-19 di Kota Mataram tertinggi dari 10 kabupaten atau kota dan sudah menyebar di enam kecamatan yang ada.

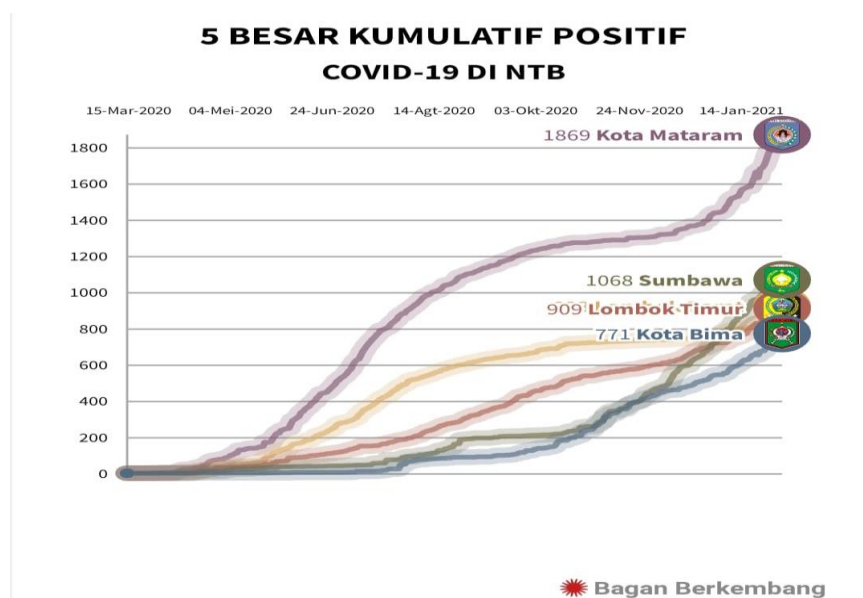
Data pertanggal 04 Juni 2021 pukul 22.08 Wita, yang dikutip dari Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat:

Tabel 2
Covid-19 Di Nusa Tenggara Barat (04 Juni 2021)

Rawat	Sembuh	Meninggal	Jumlah
500 (3.66%)	12.574 (91.93%)	604 (4.42%)	13.678

Sumber: Dinas Kesehatan NTB

Gambar 2



Sumber: <https://corona.ntbprov.go.id/>

Dari tabel 5.1 yang dikutip dari Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat dapat dijelaskan bahwa jumlah pasien yang dirawat Covid-19 berjumlah 500 orang atau persentase sebesar 3.66%. Sementara untuk pasien yang telah sembuh berjumlah 12.574 orang dengan persentase 91.93%. Kemudian pasien yang meninggal akibat terpapar Covid-19 di Nusa Tenggara Barat berjumlah 604 orang dengan persentase 4.42%. Sementara itu dari gambar 5.1 jumlah kumulatif positif Covid-19 di NTB dengan persebaran 5 daerah tertinggi pertanggal 04 Juni 2021 pukul 22.08 Wita, dapat dilihat bahwa Kota Mataram tertinggi dengan angka 1869 orang, kemudian Sumbawa berjumlah 1068 orang, lalu ada Lombok Barat dengan jumlah 993 orang, selanjutnya Lombok Timur 909 orang, dan disusul Kota Bima dengan jumlah 771 orang. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, artinya Kota Mataram masih tertinggi kasus Covid-19.

Pemerintah Kota Mataram mendesain sebuah kebijakan kegiatan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL), sebagai upaya menekan dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Mataram. Untuk mensukseskan kebijakan dengan pendekatan lingkungan tersebut, Pemerintah Kota Mataram sebagai langkah awal melalui kegiatan PCBL telah mendistribusikan berbagai alat pendukung kepada perwakilan 325 kepala lingkungan se-Kota Mataram. Penangan dan pencegahan Covid-19 menggunakan skema PCBL dinilai lebih efektif. Skema tersebut dapat membangkitkan partisipasi masyarakat di lingkungan yang berada di Kota Mataram dalam mencegah merebaknya Covid-19 di tengah masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram Lalu Martawang: “Melanjutkan instruksi pak Wali Kota Mataram, ini semua dilakukan sebagai ikhtiar lewat kebijakan yang bersifat kearifan lokal, Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) di Kota Mataram, diharapkan kepada seluruh kepala lingkungan dan masyarakat Kota Mataram, dapat memutus penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing dengan memperketat pengawasan protokol penanganan Covid-19. Pemkot Mataram sendiri mengalokasikan anggaran 45 Milyar rupiah untuk penanganan covid-19. Anggaran ini selain untuk membantu warga terdampak dengan menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial juga untuk membeli sejumlah peralatan pencegahan covid-19. PCBL membutuhkan peran seluruh komponen yang ada di masyarakat, unsur TNI, Polri, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat di lingkungan, serta mengoptimalkan kader pelayanan terpadu Kota Mataram, yang saat ini berjumlah 1.200 orang. Secara konsep, PCBL menggunakan tiga pendekatan yakni partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan sumber pendanaan dari masyarakat (swadaya)”. Penanganan Covid-19 Berbasis

Lingkungan (PCBL) merupakan masukan dari teman-teman akademisi, Kota Mataram merupakan salah satu daerah yang tidak memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena menurut teman-teman akademisi pencegahan Covid-19 dari lingkungan adalah kunci untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Maka dari itu dengan mempertimbangkan dari seluruh aspek, akhirnya Kota Mataram resmi memberlakukan PCBL.

Dari hasil wawancara dengan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram dapat disimpulkan bahwa, manajemen Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram sebagai upaya memutus mata rantai Covid-19 yaitu dengan kebijakan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCovid19BL). Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang ideal untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Seluruh komponen yang ada di masyarakat, unsur TNI, Polri, serta seluruh elemen masyarakat agar mampu berkolaborasi secara kolektif dengan baik.

Pemerintah Kota Mataram Helix sebagai pembuat regulasi dan memformulasikan kebijakan dari permasalahan Covid-19 di Kota Mataram. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Mataram harus mampu melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang kondisi dan program yang akan dilaksanakan. Membahas tahapan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) diantaranya persiapan teknis dan kebutuhan setiap lingkungan, seperti tempat cuci tangan harus tersedia diseluruh lingkungan yang berada di Kota Mataram, *thermoscan*, cairan disinfektan, serta kebutuhan lainnya yang dianggap penting untuk memutus mata rantai penyebarab Covid-19 di Kota Mataram. Selain itu, program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) merupakan masukan dari pihak akademisi, karena saat itu Kota Mataram lebih memilih Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL) dari pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan mempertimbangkan dari segala aspek. Pencegahan penyebaran dari lingkungan (PCBL) dianggap paling penting, karena strategi ini dianggap akan menyentuh langsung masyarakat pada lapisan yang paling bawah.

Tabel 3
Spektrum Partisipasi Publik Dalam Memutus Mata Rantai Covid-19
Di Kota Mataram

	Informasi (<i>Inform</i>)	Konsultasi (<i>Consult</i>)	Pelibatan (<i>Involve</i>)	Kerjasama (<i>Collaborate</i>)	Memberdayakan (<i>Empower</i>)
Tujuan	Menyediakan informasi yang obyektif dan seimbang, membantu memahami dan mencari alternatif solusi terhadap masalah	Mendapatkan masukan masyarakat terkait analisis, alternatif, dan atau sebuah keputusan.	Bekerja secara langsung dengan masyarakat melalui sebuah proses untuk memastikan aspirasi masyarakat secara konsisten dipertimbangkan.	Bermitra dengan masyarakat di setiap aspek pengambilan keputusan, termasuk mengidentifikasi dan membangun solusi alternatif.	Menempatkan pembuatan keputusan final di tangan masyarakat.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada lima tingkat partisipasi publik dalam penanganan Covid-19 di Kota Mataram, dari yang paling rendah yakni *inform* (menginformasikan kepada masyarakat) merupakan tugas Pemerintah Kota Mataram untuk mensosialisasikan program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCovid19BL), setelah itu meningkat menjadi *consult* (konsultasi dengan masyarakat agar mendapatkan masukan yang ideal dalam upaya penanganan Covid-19 di Kota Mataram), *involve* (melibatkan masyarakat untuk berkerjasama memutus mata rantai Covid-19), *collaborate* (Pemerintah Kota Mataram berkolaborasi bersama masyarakat untuk sama-sama menekan laju penyebaran Covid-19), dan yang paling tinggi adalah *empower* (memberdayakan masyarakat Kota Mataram dalam perumusan kebijakan publik). Dalam merespon perkembangan wabah Covid-19 yang sangat cepat dan kompleks ini, spektrum diatas telah diterapkan dalam manajemen bencana non alam Covid-19 di Kota Mataram.

Idealnya, partisipasi publik bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Dalam konteks darurat penanganan dan pencegahan Covid-19, partisipasi publik juga bertujuan melibatkan publik untuk menerapkan pendekatan pencegahan Covid-19 melalui *social distancing* dan *stay at home*. Yang pertama merupakan partisipasi publik aktif dan kedua merupakan partisipasi publik pasif. Kedua pendekatan partisipasi publik tersebut, baik partisipasi publik aktif maupun partisipasi publik pasif, perlu digunakan oleh pemerintah untuk memastikan efektifitas sebuah kebijakan.

Dalam partisipasi publik aktif, Pemerintah tidak boleh mengabaikan suara masyarakat tentang pilihan-pilihan kebijakan dalam penanganan Covid-19. Karena bagaimanapun, Pemerintah juga mempunyai keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman. Dalam kondisi ini, melibatkan masyarakat (sesuai spektrum diatas) menjadi sebuah kebutuhan, jika dan hanya jika pemerintah mau membuka diri terhadap masyarakat.

Sementara untuk partisipasi pasif, tantangannya adalah bagaimana Pemerintah bisa memastikan masyarakat berpartisipasi dalam menerapkan kebijakan dan pendekatan pencegahan Covid-19, khususnya *social distancing* dan *stay at home*. Dalam konteks ini, Pemerintah bisa menggunakan kekuasaannya melalui kontrol alat-alat Negara untuk memastikan masyarakat berpartisipasi dalam *social distancing* dan *stays at home* ini. Tanpa adanya kontrol negara yang memadai, partisipasi masyarakat dalam *social distancing* dan *stays at home* tidak mudah untuk diimplementasi.

PENUTUP

Inovasi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 dikenal dengan kebijakan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Skema Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan tersebut dapat membangkitkan partisipasi masyarakat di lingkungan yang berada di Kota Mataram dalam mencegah merebaknya Covid-19 di tengah masyarakat. Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan menggunakan tiga pendekatan yakni partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan sumber pendanaan dari masyarakat (swadaya). Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang ideal untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Seluruh komponen yang ada masyarakat, TNI, dan Polri agar mampu berkolaborasi secara kolektif dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Carayannis, E. G., and Campbell, D. F. J. (2009). Mode 3 and Quadruple Helix: toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International journal of Technology Management*, 46 (3), 201-234.
- Delman, J., & Madsen, ST.(2007),Nordic triple helix collaboration in knowledge, innovation, and business in China and India: a preliminary study.NIAS-Nordic Institute of Asian Studies, Copenhagen
- Ilham, & Renyaan, D. (2021). Edukasi Membudayakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten

Journal of Government and Politics (JGOP) Vol. 3 No. 2 Desember 2021 Hal. 138-147
Jayapura. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 5(1), 12–23.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/3186/pdf>

Pratama, I. N., Hadi, A., & Zitri, I. (2021). Manajemen Bencana Non Alam Covid-19
Dilihat Dari Kepemimpinan Quadruple Helix Di Kota Mataram. *Jurnal Ilmiah
Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(2), 230-244.

Rahayu, Sri. (2013), “The Quadruple Helix Model (Universities, Academic,
Entreprises, Government and Community) Sebagai Model Ideal Untuk Sistem
Inovasi Lokal Efektif Terkait Penanggulangan Kemiskinan Di Negara
Bekembang”, Pusat Penelitian Perkembangan Iptek-LIPI, 2013.

Bantuan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara <https://www.ntbprov.go.id/post/tangani-covid-19-pemprov-ntb-terima-dukungan-pt-amnt> diakses pada 15 Mei 2021

Partisipasi Publik Dalam Penanganan Covid-19 <https://iap2.or.id/covid-19/> diakses pada 15
Mei 2021

Program Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan

[https://www.antaraneews.com/berita/1471197/penanganan-covid-19-berbasis-
lingkungan-dicanangkan-di-mataram-ntb](https://www.antaraneews.com/berita/1471197/penanganan-covid-19-berbasis-lingkungan-dicanangkan-di-mataram-ntb) diakses pada 15 Mei 2021

Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

[https://www.amman.co.id/id/news/mining-sector-helped-to-sustain-ntbs-economy-
during-covid-19-pandemic/](https://www.amman.co.id/id/news/mining-sector-helped-to-sustain-ntbs-economy-during-covid-19-pandemic/) diakses pada 15 Mei 2021.